

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah sebagai lembaga publik saat ini sudah dapat dimonitor oleh masyarakat melalui berbagai media. Kecanggihan teknologi membuat masyarakat mampu mengakses dan mengawasi kinerja dari setiap institusi, terutama kinerja instansi pemerintah. Hal ini dipicu oleh banyaknya terungkap kasus-kasus yang terjadi di lingkup pemerintah, sehingga mengakibatkan keingintahuan publik semakin tinggi terhadap transparansi dan kinerja pemerintah.

Transparansi atas informasi publik juga dapat membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik bertanggungjawab atas kinerjanya dan dapat dipercaya dalam menyampaikan informasi publik.

United Nations Development Program (UNDP 1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu harus adanya transparansi, transparansi dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi terhadap publik.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Sedarmayanti (2004) “*good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun (2000) dalam Sedarmayanti (2004) “*good governance* adalah pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip- prinsip profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”

Menurut Sedarmayanti (2004) terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juga berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang hal yang sama dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki serta dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang pelaporan kinerja pada unit-unit kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Badan Pemeriksa Keuangan menyusun Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki perwakilan di setiap provinsinya.

Berdasarkan Rencana Strategis 2016-2020 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD. Pada tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meraih peringkat I hasil penilaian kinerja anggaran tingkat kementerian negara/lembaga semester II tahun 2016 dengan kategori pagu belanja sampai dengan Rp100 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan

peringkat III keterbukaan informasi publik peringkat Sumatera Barat tahun 2017 kategori instansi vertikal.

Walaupun Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berwenang sebagai pengelola, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya baik keberhasilan kinerja maupun kegagalan kinerjanya, serta melaporkan kinerjanya dalam satu tahun anggaran. Dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat wajib menyusun laporan kinerjanya yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2017, Laporan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja yang telah dicapai selama tahun anggaran serta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap instansi/institusi sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama satu tahun anggaran. Serta sebagai bahan evaluasi dari instansi/institusi dari rangkaian programnya untuk tahun kedepan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat sebuah topik yang berjudul **“Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan tentang laporan akuntabilitas kinerja pada latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mewujudkan pencapaian kinerja dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pencapaian kinerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Adapun tujuan yang dicapai dari kuliah praktek/magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mewujudkan pencapaian kinerja serta mengetahui upaya yang

dilakukan dalam mengatasi permasalahan pencapaian kinerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

3. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswi DIII Keuangan untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Untuk mempraktekan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan yang sesuai dengan jurusan yaitu Diploma III Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang ini.
7. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam bentuk yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.

1.4 Manfaat Magang

Magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pada organisasi pemerintahan sehingga dapat memberikan manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh bagi penulis sebagai berikut :

1. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
2. Dapat menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan.
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja dan mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.

Sementara manfaat magang bagi universitas adalah :

1. Menciptakan SDM dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Menjalin kerjasama serta hubungan baik antar kependidikan dengan organisasi/instansi.

Manfaat magang bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.
2. Membina hubungan baik antar dunia pendidikan dengan lembaga/organisasi

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang beralamatkan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54, Lolong Belanti, Padang. Pelaksanaan magang berlangsung selama 43 hari kerja, dimulai pada tanggal 7 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 8 Maret 2019. Jam kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat adalah pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB.

Selama mengikuti kegiatan magang ini penulis ditempatkan pada Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan dimana bagian tersebut sesuai dengan judul laporan magang penulis yaitu Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan (*Library Reaserach*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis guna melengkapi *Field Research*.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Analisa Deskriptif berupa pandangan, tujuan, uraian dan paparan dari penulis yang berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh serta membandingkannya dengan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan.

1.7 Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat, waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari penjelasan teoritis tentang pengertian laporan akuntabilitas kinerja, tujuan akuntabilitas kinerja, syarat akuntabilitas kinerja, dasar hukum pemberlakuan laporan akuntabilitas kinerja, prinsip-

prinsip laporan akuntabilitas kinerja, fungsi laporan akuntabilitas kinerja, dan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum , sejarah berdirinya Badan Pemeriksa Perwakilan, visi misi dan nilai dasar, tujuan dan sasaran strategi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

